

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang dalam hal pendistribusian subsidi LPG 3 Kg pada awalnya menggunakan sistem distribusi tertutup. Distribusi tertutup digunakan dengan harapan bahwa terdapat regulasi yang mengatur terkait dengan pendistribusian tertutup yang pada awalnya terdapat dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG tetapi regulasi tersebut terdapat perubahan menjadi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2021. Perubahan ini menghapus beberapa pasal yang mengatur terkait distribusi tertutup. Sehingga akan memunculkan permasalahan yang akan berdampak buruk pada masyarakat Indonesia secara langsung. Seperti adanya ketidaktepatan sasaran subjek penerima yang akan membuat adanya kerentanan konsumen.

Permasalahan muncul akibat adanya kekosongan hukum yang membuat tidak adanya regulasi yang mengatur terkait distribusi tertutup subsidi LPG 3 Kg. Sehingga penulis mengajukan suatu Prinsip baru yaitu Prinsip *Knowing Personalized Distribution*. Prinsip ini berfokus pada pendekatan zona territorial dari subjek penerima. Dengan adanya prinsip ini diharapkan subsidi LPG 3 Kg dapat tepat sasaran. Sehingga masyarakat akan mendapatkan berbagai perlindungan yang akan melindungi dari oknum yang berniat melakukan kegiatan illegal.

Berbagai permasalahan muncul serta adanya kekosongan hukum tersebut maka saya mengajukan suatu prinsip yang akan menggantikan peran dari distribusi tertutup. Prinsip tersebut bernama Prinsip *Knowing Personalized Distribution*. Sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan serta hak-hak pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan *statue approach* yaitu perundang-undangan, *historical approach* yaitu menelusuri berbagai perkembangan mengenai pendistribusian LPG 3 Kg, serta *conseptual approach* yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dan berbagai doktrin. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori negara kesejahteraan, keadilan dan kepastian, dan *good governance*.

Sehingga hasil dari penelitian ini adalah pentingnya membuat suatu regulasi baru yang mengatur terkait distribusi tertutup sesuai dengan golongan masyarakat yang membutuhkan. Prinsip *Knowing Personalized Distribution* akan membuat pendistribusian yang tepat sasaran berdasarkan dengan siapa pihak yang berhak menerima, bagaimana mekanisme penyaluran pendistribusiannya serta sanksi yang dapat diberikan. Hal ini diharapkan dapat melindungi hak-hak dari pihak konsumen dan dapat memberikan keadilan dan kepastian kepada masyarakat.

Kata Kunci: Distribusi, Subsidi, LPG

ABSTRACT

Indonesia is a welfare state where the distribution of subsidized 3 kg LPG initially employed a closed distribution system. This system was implemented with the expectation of robust regulations, originally stipulated in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 26 of 2009 concerning the Provision and Distribution of LPG. However, this regulation was subsequently amended by the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 28 of 2021. This amendment revoked several articles governing the closed distribution mechanism, thereby creating issues that directly impact the Indonesian people, such as the mistargeting of recipients which leads to consumer vulnerability.

These problems arise due to a legal vacuum resulting from the absence of specific regulations governing the closed distribution of subsidized 3 kg LPG. Consequently, the author proposes a new principle the Knowing Personalized Distribution principle. This principle focuses on a territorial zoning approach for the recipients. By implementing this principle, it is expected that 3 kg LPG subsidies will be accurately targeted, ensuring that the community receives various forms of protection against illegal activities by unscrupulous actors.

In response to these issues and the existing legal vacuum, the author proposes a principle to replace the role of the previous closed distribution system, namely the Knowing Personalized Distribution principle, to ensure that the public attains both protection and personal rights.

This study employs several research methods: the statute approach, by examining relevant legislation; the historical approach, by tracing the development of 3 kg LPG distribution; and the conceptual approach, by identifying legal principles and doctrines. The theories utilized in this research include the Welfare State theory, Justice and Legal Certainty, and Good Governance.

The results of this study emphasize the importance of establishing new regulations to govern closed distribution tailored to the specific groups in need. The Knowing Personalized Distribution principle will ensure accurate distribution by regulating eligible parties, distribution mechanisms, and applicable sanctions. This is expected to safeguard consumer rights and provide justice and legal certainty for the community.

Keywords: *Distribution, Subsidy, LPG*